

EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI KABUPATEN KENDAL

Dewi Ratnawati¹, Ngatini², Fitriyati Dyah Permatasari³, Nurkolis⁴

¹SMP N 3 Singorojo Kabupaten Kendal

²SMP N 1 Boja Kabupaten Kendal

³SMP N 2 Cepiring Kabupaten Kendal

⁴Universitas PGRI Semarang

dewiratnawati01@guru.smp.belajar.id

ABSTRACT

The principles of transparency and accountability can be implemented by fulfilling the principles of propriety and good governance by education providers. The objectives of this research are 1) to determine and analyze the application of the principles of transparency and accountability in education financing. 2) to determine and analyze the effectiveness of the application of the principles of transparency and accountability in financing education at SMP N Kendal Regency. Researchers use mixed methods research, namely a combination of qualitative and quantitative methods. In data collection techniques, researchers used interview techniques with informants, distributing questionnaires and documentation. To analyze quantitative data, multiple regression is used as a data analysis technique with the F test and t test. The results of the research are 1) the school principal designs a budget that is aligned with operational needs and programs. Make financial accountability reports and reports available on the school information board. The implementation of accountability in education financing is aligned using accountability indicators, which are displayed with evidence of documentation of the budget results for each activity and the preparation of financial reports for monthly, annual periods, and are accountable to the relevant agencies. 2) Effectiveness of Implementing the Principles of Transparency and Accountability in Education Financing at SMP N Kendal Regency. The results of multiple regression analysis show the equation $\hat{Y} = 24.532 + 0.610 X_1 + 0.456 X_2$. The effectiveness of transparency and accountability in financing Kendal District High School education is 75.9%.

Keywords: *Transparency Principle, Accountability Principle, Education Financing*

ABSTRAK

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh penyelenggara pendidikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan 2) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal. Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode campuran, yakni adanya penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan, penyebaran angket serta dokumentasi. Untuk menganalisis data kauntitatif menggunakan regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian yaitu

1) kepala sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan serta program operasional. Membuat laporan petanggungjawaban keuangan dan laporan tersedia di papan informasi sekolah. Pelaksanaan akuntabilitas pada pembiayaan pendidikan diselaraskan menggunakan indikator akuntabilitas, yang dimunculkan dengan bukti dokumentasi hasil anggaran setiap kegiatan dan penyusunan laporan keuangan dengan periode bulanan, tahunan, dan bertanggung jawab kepada dinas terkait. 2) Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan persamaan $\hat{Y} = 24,532 + 0,610 X_1 + 0,456 X_2$. Besar efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal sebesar 75,9 %.

Kata Kunci: *Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Pembiayaan Pendidikan*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 1 ayat 10 dan 11 menyebutkan bahwa: Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dilanjutkan pada pasal 1 ayat 11 bahwa Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Kemudian dalam UU No. 20 Th 2003 pasal 48 menyebutkan terdapat empat prinsip pengelolaan dana pendidikan yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Demikian pula menurut PP 48 Tahun 2008, pasal 58 terdapat empat prinsip umum pengelolaan dana pendidikan yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Prinsip keadilan dapat diwujudkan jika pengelola sekolah memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya

tanpa ada syarat dan batasan serta merata kepada peserta didik atau calon peserta didik. Prinsip keadilan diterapkan tanpa membedakan latar belakang SARA atau suku, ras, agama, dan antara golongan. Jika tidak membedakan jenis kelamin, dan apalagi membedakan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Guna mencapai prinsip efisiensi maka sekolah dapat mengoptimalkan akses layanan pendidikan, mencapai mutu yang telah ditetapkan, dan relevansi muatan pendidikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta meningkatkan daya saing pelayanan pendidikan. Prinsip transparansi dapat dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat atau swasta, dan satuan pendidikan. Prinsip transparansi dapat dilakukan dengan cara diaudit atas dasar standar audit yang berlaku. Audit tersebut menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian. Prinsip transtransi juga dapat terwujud jika dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Prinsip akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pemangku kepentingan pendidikan baik internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal menyatakan bahwa masih ditemukan di beberapa sekolah yang belum melakukan transparansi pembiayaan pendidikan, kemudian belum lengkapnya Kediaan dokumen dan kelengkapan informasi serta Keterbukaan proses. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui pembiayaan yang di lakukan oleh sekolah. kemudian dalam akuntabilitas masih ditemukan bahwa akses ke publik terhadap laporan yang telah dibuat susah di peroleh. Kepala sekolah harus secara rutin untuk melaporkan semua manajemen pengelolaan sekolah baik berupa dokumen atau lewat ke website

sekolah agar semua warga dapat mengetahui proses dan prosedur keuangan sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ini ingin mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal? 2) bagaimana efektifitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal. 2) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal

1. ORISINALITAS PENELITIAN

Untuk mengetahui kebaruan dalam penelitian ini maka perlu

dilakukan kajian penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa hasil studi penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ella (2020) yang menemukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah tidak terkecuali komite sekolah selaku perwakilan dari masyarakat pada setiap pengelolaan dana BOS dan juga adanya mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang menggunakan dana BOS sebagai sumber keuangan sekolah kepada masyarakat hal tersebut memanfaatkan Media yang digunakan oleh sekolah sebagai alat penginformasian data keuangan sekolah yang berupa media Online dan Media Offline, serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat sebagai dampak dari adanya transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Handika (2023) membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada

SMPN 12 berjalan dengan baik. Penerapan prinsip akuntabilitas telah berhasil ditunjukkan dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pengelolaan program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Petunjuk teknis (Juknis). Penerapan prinsip transparansi ditunjukkan dengan penyusunan anggaran sekolah yang di rapatkan dan dihadiri oleh kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan perwakilan OSIS, serta penyampaian laporan melalui sistem publik.

Selanjutnya Firmansyah (2022) juga melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa Penerapan prinsip transparansi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 11 Pinrang. Pada penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penggunaannya di laporkan pada Dinas Pendidikan secara offline maupun online. Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan secara triwulan. Adapun publikasi laporan dilakukan melalui rapat-rapat dan juga dapat diakses melalui online melalui laman resmi E-Bos. Penerapan prinsip akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh SMP

Negeri 11 Pinrang, pada penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah, dalam pertanggungjawabannya sekolah melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggung jawaban tersebut menjadi cerminan sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga menumbuhkan kepercayaan oleh masyarakat terhadap sekolah.

Penelitian juga dilakukan oleh Susisanti (2021) yang membuktikan bahwa: 1) ada yang positif dan hubungan yang signifikan antara transparansi dan partisipasi masyarakat; dan 2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara akuntabilitas dan komunitas partisipasi. Dengan demikian, penerapan transparansi dalam pengelolaan pendidikan akan terwujud mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut serta membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Dari hasil studi penelitian sebelumnya didapatkan beberapa persamaan dalam

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan pada sekolah dan terdapat fokus penelitian pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yakni terdapat perbedaan dimana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yakni prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mardiasmo (2011: 34) transparansi berarti keterbukaan lembaga pendidikan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sekolah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Dharma, 2010: 31). Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan sekolah (Mahmudi, 2010: 66).

Kristianten (2016: 73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator: a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen b) Kejelasan dan kelengkapan informasi c) Keterbukaan proses d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut: a) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu b) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya c) Kemudahan akses informasi d) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Scahcter dalam Raba (2020: 54) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup sebuah aktivitas yang hanya menjelaskan atas kegiatan yang telah dijalankan, namun pertanggungjawaban juga berkaitan dengan tindakan dalam melakukan perbaikan terhadap

tindakan yang dilakukan kurang tepat.

Hamid dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu memungkinkan individu dan organisasi untuk bertanggungjawab atas hasil yang diukur seobjektif mungkin. Menurut Rasul (2012: 8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi yang memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Halim, 2014: 150). Menurut Darise dalam Afrilianti (2017:13) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syahriyatul (2017: 8) akuntabilitas adalah

mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Mulyasa dalam Fierda (2015:32) mengemukakan akuntabilitas adalah, “pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama satu tahun anggaran. Pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah

Indikator akuntabilitas menurut Solihin (2017: 11) antara lain: 1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat 2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah 3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka 4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu: a) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap

pengelolaan keuangan oleh sekolah
b) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pengelolaan keuangan sekolah c) Berkurangnya kasus korupsi di dalam lingkup sekolah.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode campuran, yakni adanya penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2016). Pada prosesnya, metode kuantitatif tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, objektif dan terpercaya. Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam menyikapi permasalahan penelitian ini yang menghasilkan data kuantitatif yang menjelaskan data kualitatif.

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan, penyebaran angket serta dokumentasi. Sedangkan pada proses penganalisis data, teknik

analisis deskriptif menjadi metode yang digunakan oleh peneliti, yang merupakan pendapat dan penjelasan dari masing-masing sudut pandang yang sedang diteliti. Analisis data pada penelitian kualitatif diproses disaat terkumpulnya data dalam kurun waktu yang ditentukan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 56). Untuk menganalisis data kauntitatif menggunakan regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data dengan uji F dan uji t.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Perencanaan transparansi pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal yaitu kepala sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan serta program

operasional tiap-tiap unit sekolah. Rencana kegiatan anggaran sekolah dibuat di tiap SMP di Kabupaten Kendal sebagai bentuk transparansi perencanaan keuangan. Pada penyusunan RKAS diaplikasikan dengan sistem usulan anggaran kegiatan dari bawah (komite, staf dan guru) yang disebut pula system startup, yang masih memerlukan persetujuan pihak atas, yakni kepala sekolah. Perancangan anggaran di sekolah mengaitkan berbagai pihak, yakni staf, guru, komite hingga kepala sekolah yang melakukan penyusunan rancangan anggaran agar selaras dengan JUKNIS. Yang secara rutin membuat laporan petanggungjawaban keuangan dan laporan tersedia di papan informasi sekolah. Selain itu, dinas pendidikan kabupaten dan provinsi memiliki tim inspeksi atau pemantauan independen. Sikap keterbukaan dilakukan selaras dengan parameter yang berlandaskan pada perolehan wawancara dengan informan. Hasil evaluasi penggunaan dana kini dipantau tiap tiga bulan untuk dan periode enam bulan.

Pelaksanaan akuntabilitas pada pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal diselaraskan menggunakan indikator penerapan sikap tanggung jawab, yang dimunculkan dengan bukti dokumentasi hasil anggaran setiap kegiatan yang memberikan informasi tentang sekolah kepada kebijakan anggaran pemangku kepentingan. Perihal ini selaras dengan temuan peneliti di SMP N Kabupaten Kendal bahwasannya, pihak sekolah memberikan tempo terhadap staf, komite dan guru sekolah dalam ikut serta secara nyata pada perancangan dan penerapan anggaran operasional/program sekolah.

Keikutsertaan para pihak, yang merupakan guru dan staf SMP N Kabupaten Kendal, secara khusus dengan menggunakan proposal pengajuan dengan format daftar-daftar usulan yang dibutuhkan pada pembuatan RKAS dalam satu tahun ajaran. Dalam upaya sikap transparansi dan akuntabilitas pelaksana yang berkepentingan, SMP N Kabupaten Kendal melakukan

penyusunan laporan keuangan dengan periode bulanan, tahunan, dan bertanggung jawab atas keuangan kepada dinas terkait.

2. Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda perolehan statistik pada efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal dengan hasil penelitian sebagian terkomputerisasi melalui program SPSS dan penganalisisan regresi berganda dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa model hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan dinyatakan dengan persamaan $\hat{Y} = 24,532 + 0,610 X_1 + 0,456 X_2$. Nilai koefisien regresi variabel transparansi adalah 0,610, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan

transparansi sebesar 1, maka efektivitas pembiayaan pendidikan akan meningkat 0,610 jika tidak ada pengaruh variabel bebas lainnya. Begitu juga untuk nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas adalah 0,456, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1, maka efektivitas pembiayaan pendidikan akan meningkat 0,456 jika tidak ada pengaruh variabel bebas lainnya.

b. Hasil uji t parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel X_1 terhadap Y 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti variabel transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan. Nilai signifikansi variabel X_2 terhadap Y 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan. Sedangkan Uji t Parsial berdasarkan nilai $t_{hitung} X_1$ terhadap Y sebesar 4,300 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.660081. Ini berarti $t_{hitung} >$

t_{tabel} ($4,300 > 1.660081$) maka variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pembiayaan Pendidikan SMP N Kabupaten Kendal. Nilai t_{hitung} X_2 terhadap Y sebesar $5,393$ sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.660081 . Ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.393 > 1.660081$) maka variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal.

- c. Besar efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal diperoleh dari nilai *R square* sebesar $75,9\%$, sisanya $24,1\%$ dipengaruhi oleh faktor lain

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan, Dimana penerapan sikap transparansi dan akuntabilitas dalam penataan dana BOS SMP N Kabupaten Kendal berjalan baik dikarenakan selaras dengan yang diharapkan.

1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan, kepala sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan serta program operasional. Pada penyusunan RKAS diaplikasikan dengan sistem usulan anggaran kegiatan dari bawah. Membuat laporan petanggungjawaban keuangan dan laporan tersedia di papan informasi sekolah. Evaluasi penggunaan dana dipantau tiap tiga bulan untuk dan periode enam bulan. Pelaksanaan akuntabilitas pada pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal diselaraskan menggunakan indikator penerapan sikap tanggung jawab, yang dimunculkan dengan bukti dokumentasi hasil anggaran setiap kegiatan. Melakukan penyusunan laporan keuangan dengan periode bulanan, tahunan, dan bertanggung jawab atas keuangan kepada dinas terkait.
2. Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal. Hasil

analisis regresi ganda menunjukkan persamaan $\hat{Y} = 24,532 + 0,610 X_1 + 0,456 X_2$. Besar efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal sebesar 75,9 %

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilianty, Karsy. 2017. *Analisis Nilai Ekonomi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar* (Studi Kasus: Lapangan Karebosi).
- Dharma, Surya. 2010. *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar:Yogya karta
- Dr. H. Manggaukang Raba. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Ella Febya Ardani & Syunu Trihantoyo. 2020. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020, 134-144
- Firmansyah Hidayat dan ISMPil Tolla. 2022. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*. Volume [3] No [1] Juni 2022
- Handika Surya Dinata, Annie Mustika Putri, Mentari Dwi Aristi. 2023. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 12 Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. '45 Vol 4 No. 1 Mei 2023| E-ISSN: 2747-2647; P-ISSN: 2828-7215, Hal 49-57
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Makhmudah, Syahriyatul. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. STIE Widyagama: Lumajang
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Solihin, Dadang. 2017. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susisanti, St. Syamsudduha, dan Musdalifa. 2022. Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Partisipasi Komunitas SMP Negeri 26 Bone. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 17 (1) (2022): 22-35
- Rasul, Syahrudin. 2012. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Afrilianty, Karsy. 2017. *Analisis Nilai Ekonomi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar (Studi Kasus: Lapangan Karebosi)*.
- Dharma, Surya. 2010. *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar:Yogya karta
- Dr. H. Manggaukang Raba. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Ella Febya Ardani & Syunu Trihantoyo. 2020. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020, 134-144
- Firmansyah Hidayat dan ISMPil Tolla. 2022. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*. Volume [3] No [1] Juni 2022
- Handika Surya Dinata, Annie Mustika Putri, Mentari Dwi Aristi. 2023. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 12 Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. '45 Vol 4 No. 1 Mei 2023| E-ISSN: 2747-2647; P-ISSN: 2828-7215, Hal 49-57
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Makhmudah, Syahriyatul. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. STIE Widyagama: Lumajang
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press

Solihin, Dadang. 2017. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susisanti, St. Syamsudduha, dan Musdalifa. 2022. Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Partisipasi Komunitas SMP Negeri 26 Bone. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 17 (1) (2022): 22-35

Rasul, Syahrudin. 2012. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.